

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun di Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ada beberapa unsur yang tidak disajikan, yaitu Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih.
2. Penerapan Standar akuntansi Pemerintah diterapkan sudah cukup lama, tetapi karena sumber daya manusia yang masih kurang memahami akrual dan masih lambat atau tidak tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Tidak tepat waktu serta kurangnya dalam memahami penyajian laporan keuangan pemicu rendahnya tingkat kualitas laporan keuangan dalam penerapan Standar akuntansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Teknologi informasi adalah istilah yang tidak asing lagi bagi perusahaan, istilah tersebut gunanya membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi perangkat pendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sudah cukupnya fasilitas computer, jaringan internet, serta pemeliharaan dan perbaikan computer untuk proses akuntansi sampai pembuatan laporan keuangan menggunakan SIMDA. Namun masih perlu diperbaiki dan dibenahi lagi dalam hal koneksi yang terintegrasi dengan

SIMDA sehingga nanti akan menghasilkan sistem informasi keuangan yang berkualitas dan terintegrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kualitas laporan keuangan disarankan agar dapat menambah faktor lainnya yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, misalnya peran internal audit pemerintah dan pengelolaan aset. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara perlu memahami cara menyusun laporan keuangan dan paham terhadap peraturan tentang pengelolaan keuangan yang berlaku saat ini agar laporan keuangan andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dan memenuhi syarat kualitas laporan yang diakuntansikan dengan benar dan dilaporkan secara lengkap.
2. Diharapkan agar Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 secara benar sehingga proses penyusunan laporan keuangan berjalan lancar dan baik. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi kepada pelayan publik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi perlu dioptimalkan oleh pemerintah dalam pembangunan jaringan sistem informasi sehingga kinerja pemerintahan akan meningkat lebih baik dan tepat waktu.